

# Analisis Kebijakan dalam Penanganan Dampak Risiko Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Bandung Jawa Barat, Indonesia

## *Policy Analysis in Handling the Impact of Covid-19 Risk on Micro, Small and Medium Enterprises in Bandung City, West Java, Indonesia*

Sam'un Jaja Raharja\*, Herwan Abdul Muhyi, & Rusdin Tahir

Departemen Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Diterima: 23 Agustus 2021; Direview: 23 Agustus 2021; Disetujui: 28 Oktober 2021

\*Email Korespondensi: [s.raharia2017@unpad.ac.id](mailto:s.raharia2017@unpad.ac.id)

### Abstrak

Wabah Covid-19 telah membawa implikasi keberbagai bidang kehidupan baik kesehatan, ekonomi maupun sosial. Dampak ekonomi dirasakan oleh semua pelaku ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dampak risiko Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kota Bandung dan merumuskan rekomendasi kebijakan bagi UMKM tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku bisnis UMKM selama masa Pandemi. Data sekunder dikumpulkan dari laporan pemerintah, berita media masa, maupun sumber-sumber dari jurnal dan laporan penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada kurun waktu bulan April sampai dengan bulan Juli 2020. Hasil Penelitian menunjukkan dampak PSBB yang dirasakan UMKM berupa penurunan penjualan 92%, permintaan 77%, kenaikan harga bahan baku 53%, kesulitan keuangan 48%, hambatan produksi 45%, kesulitan bahan baku 49% dan hambatan distribusi 38%. Penelitian menyimpulkan penerapan PSBB di Indonesia, tidak mungkin dilakukan berkepanjangan. Efek penerapan berdampak langsung pada UMKM yang kehilangan pendapatan. Pemulihan yang dibutuhkan oleh UMKM adalah akses pasar. Percepatan pemulihan dapat dilakukan dengan membuat kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dipasok oleh UMKM. Pemerintah disarankan mengkampanyekan "belanja dari UMKM". Bantuan permodalan diberikan dalam bentuk pinjaman berbunga rendah dengan periode pengembalian leluas untuk kebutuhan tambahan modal kerja.

**Kata kunci:** Covid-19; dampak ekonomi; UMKM; Kota Bandung

### Abstract

The Covid-19 outbreak has had implications for various areas of life, including health, economics and social. The economic impact is felt by all economic actors. This study aims to analyze the impact of the risk of Covid-19 on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Bandung City and formulate policy steps for these MSMEs. The research method used in this research is a combination research method, namely quantitative and qualitative methods. Primary data collection techniques through distributing questionnaires to MSMEs business actors during the Pandemic. Secondary data were collected from government reports, mass media news, as well as sources from journals and research reports. The research was carried out from April to July 2020. The results showed the impact of PSBB felt by MSMEs in the form of a decrease in sales of 92%, 77% of demand, an increase in raw material prices of 53%, 48% of financial difficulties, 45% of production constraints, of raw material difficulties 49 % and distribution barriers 38%. The research concludes that the implementation of PSBB in Indonesia is unlikely to be prolonged. The effect of implementation has a direct impact on MSMEs that lose income. The recovery needed by MSMEs is market access. Acceleration of recovery can be done by making policies for the procurement of goods and services supplied by MSMEs. The government is advised to campaign for "spending from MSMEs." Capital assistance is provided in the form of low-interest loans with a wide payback period for additional working capital needs.

**Keywords:** Covid-19; economic impact; MSMEs; Bandung City

**How to Cite:** Raharja, S.J. & Adiprihadi, D. (2022). Analisis Kebijakan dalam Penanganan Dampak Risiko Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Bandung Jawa Barat, Indonesia, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (3): 1514 -1526.



## PENDAHULUAN

Wabah corona virus yang kemudian dikenal sebagai Covid-19 telah membawa implikasi keberbagai bidang kehidupan baik kesehatan, ekonomi maupun sosial. Memperkuat pernyataan di atas Donathu & Gustafsson (2020) menegaskan *"The current outbreak has had severe economic consequences across the globe, and it does not look like any country will be unaffected. This not only has consequences for the economy; all of society is affected, which has led to dramatic changes in how businesses act and consumers behave."* Singkat kata pernyataan Donathu & Gustafsson mengindikasikan seluruh aspek kehidupan masyarakat terdampak oleh Covid-19 tersebut, baik lokal maupun global, perkotaan maupun perdesaan. Dampak ekonomi dirasakan oleh semua pelaku ekonomi. Pernyataan ini bersambungan dengan apa yang dikemukakan Sarip et al. (2020) bahwa dalam rangka penanganan Covid-19, banyak pengalihan anggaran termasuk di desa-desa, yang dikenal dengan istilah *re-focusing* Dampak. Pandemi covid-19 yang menyebar pada akhirnya membawa risiko sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan dan investasi (Aditia et al., 2020). Lesunya sektor pariwisata memiliki efek domino terhadap sektor UMKM (Pratiwi, 2020). Diperkirakan lebih dari 50% UMKM diindikasikan bisa gulung tikar (Thaha, 2020). Lebih lanjut Pratiwi menyatakan penurunan terhadap usaha makanan-minuman mikro 27%, usaha kecil makanan-minuman 1,77%, usaha menengah 0,07%.

Sejalan dengan Pratiwi, Ezizwita (2020) menambahkan bahwa sektor industri termasuk kuliner mengalami gangguan pasokan bahan baku, permintaan produk, kekurangan tenaga kerja dan ketidakjelasan usaha. Aminy & Fithriasari (2020) menambahkan terdapat 4 (empat) sektor utama yang terdampak yaitu industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. UMKM adalah jenis usaha yang paling banyak terdampak dari pandemik covid-19 (Rosita, 2020). Dalam hal dampak terhadap UMKM 48 % mengalami permasalahan pada penjualan Aminy & Fithriasari (2020). Dampak tersebut berturut adalah penurunan penjualan, kesulitan permodalan, hambatan distribusi produk, serta kesulitan bahan baku (Sugiri, 2020)

Akibat semua itu mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan sebagaimana ditegaskan oleh Wulandari (2020) bahwa Covid-19 mengakibatkan sebagian karyawan dirumahkan bahkan sampai dengan PHK. Oleh karena itu sebagaimana dikemukakan oleh Mufida et al. (2020) bahwa pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dari aspek ekonomi diantaranya paket ekonomi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat seperti bantuan langsung tunai (BLT), menurunkan biaya listrik dan BBM, memberikan pemeriksaan gratis, serta memberikan insentif bagi tenaga medis.

Banyak penelitian tentang PSBB yang sudah dilakukan oleh para peneliti. Penelitian-penelitian tersebut memandang PSBB sebagai kebijakan kompromi antara kebijakan perlindungan kesehatan dan kebijakan ekonomi yang harus tetap berjalan. Namun hasilnya kurang efektif. Kekuranganeftifan PSBB ditegaskan oleh Ristyawati (2020) bahwa jika dikaitkan dengan UUD 1945, PSBB kurang efektif karena masyarakat merasa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada yang dibuat pemerintah saat ini. Hal ini juga sejalan dengan Mujani & Irvani (2020) yang menyatakan ketidaktaatan warga terhadap PSBB disebabkan keharusan untuk bekerja di luar rumah, yang didominasi oleh warga dengan latar belakang pendidikan dan pendapatan rendah (tidak memiliki tabungan yang cukup atau bahkan samasekali tidak memiliki), sehingga harus bekerja setiap hari). Hal ini memperkuat Ristyawati (2020) bahwa memang pemerintah belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap warganya.

Kekuranganeftifan tersebut juga disebabkan karena pembuatan kebijakan tersebut cenderung didasarkan *assumption base policy* menurut cara pandang pemerintah, sering tidak sesuai dengan evidensi lapangan. Ketidaksesuaian ini dapat mengakibatkan *bad*



*implementation* bahkan *un-implementation*. Karyono et al. (2020) menyatakan bahwa dari aspek hukum berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mencegah penyebaran Covid-19, namun realitas sampai saat ini belum ada perubahan signifikan. Hal ini karena tidak didukung upaya yang lebih tegas, sehingga keberadaan regulasi tidak efektif. Ketidakefektifan ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan kebijakan bersifat asumsi belaka, tidak berdasar atas evidensi

Perumusan kebijakan yang belum berbasiskan *evidence*, hanya asumsi-asumsi "*mind set*" pengambil kebijakan dikhawatirkan tidak efektif dalam implementasinya. Hal ini diperkuat oleh Supriyadi (2020) yang menyoroiti implementasi pemberian bantuan bahwa ditemukan data penerima yang tidak akurat, penyaluran bantuan yang bersamaan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta landasan hukum yang membuka ruang penyalahgunaan wewenang.

Terkait dengan riset dan analisis kebijakan berbasiskan evidensi, Agustino (2020) mengemukakan bahwa dalam menangani Covid-19, menemukan (1) adanya narasi negatif dan lambannya respon pemerintah yang menunjukkan nihilnya *sense of crisis* yang mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan (2) lemahnya koordinasi dan ketidaksinkronan antar pemerintah pusat dan daerah. Lemahnya koordinasi ini diakui oleh Pangaribuan & Munandar (2021) dalam penelitian di DKI Jakarta bahwa kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 belum sepenuhnya efektif karena adanya hambatan yang berasal dari ketidakpatuhan masyarakat dan lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah.

Hal yang hampir sama ditegaskan oleh Pratiwi (2021), yaitu adanya problematika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara umum maupun dalam penanganan Covid-19 di Indonesia mengakibatkan ketidak-efektifan kebijakan penanganan Covid-19

Kelemahan lainnya dalam kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah inkonsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantiaan Kesehatan. Permadhi & Sudirga (2020) menyatakan bahwa dalam kebijakan penanganan Covid-19 masih didasarkan pada subyektifitas Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini karena PSBB tidak mengatur secara lengkap kriteria, metode dan pelaksanaan karantina rumah, rumah sakit, karantina wilayah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Memperkuat Permadhi dan Sudirga, Nurfurqon (2020) menyatakan perlunya perbaikan pengambilan keputusan, perancangan dan pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu Adiraharja (2020) menyatakan dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat terjadi kegamangan di level pemerintah daerah, karena disatu pihak dengan desentralisasi bidang kesehatan, standar layanan kesehatan dasar bervariasi tergantung pada komitmen dan kemampuan fiskal di daerah. Sementara disisi lain harus dipastikan layanan kesehatan harus sesuai dengan standar penanganan COVID-19.

Mengacu kepada beberapa penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian ini. Pertama, pada umumnya beberapa penelitian sebagaimana dikemukakan di atas bersifat umum dan bertumpu pada penilaian efektivitas kebijakan PSBB. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis dampak PSBB terhadap UMKM. Kedua, saran kebijakan yang dikemukakan pada penelitian terdahulu bertumpu pada bagaimana bagaimana memberikan perlindungan kepada warga, layanan Kesehatan dan perbaikan perancangan dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini secara khusus merekomendasikan penanganan dampak PSBB terhadap UMKM. Ketiga, penelitian ini juga mengeksplorasi kesiapan menghadapi bencana untuk kelangsungan bisnis, dimana penelitian eksplorasi dan faktor-faktor penentu kesiapan bencana untuk UMKM belum banyak. Penelitian ini menganalisis pengaruh pembuat keputusan terhadap kesiapan UMKM dalam menghadapi Covid-19 yang berpengaruh bagi ekonomi nasional dan global. Namun,



nampaknya UMKM kurang siap mengelola risiko karena dukungan kelembagaan yang lemah dan UMKM, khususnya di negara berkembang, tidak memiliki sistem manajemen risiko maupun kelangsungan bisnis (Han & Nigg, 2011).

Bencana pandemik Covid-19 baru pertama kali terjadi, karenanya belum ada penelitian apa saja yang menjadi risiko UMKM. Ada beberapa penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor bisnis yang terpengaruh krisis ekonomi global. Krisis ekonomi 2008 menyebabkan sosial ekonomi yang parah dan berdampak pada UMKM di hampir setiap negara. Di luar perkiraan, efek domino, menyebabkan penutupan UMKM secara besar-besaran, turunnya skala dan jumlah usaha. UMKM rentan terhadap risiko bencana di empat bidang: modal, tenaga kerja, logistik, dan pasar (Liu et al., 2013).

UMKM yang berada di bawah tekanan akan mengalami penurunan permintaan dan pendapatan, peningkatan PHK, dan tekanan lingkungan kerja. Selama krisis, UMKM rentan karena arus kas dan struktur keuangan yang lemah, cadangan modal kerja yang rendah, masalah likuiditas, ketergantungan pada sumber daya keuangan eksternal, keterlambatan pembayaran piutang, kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk membuat keputusan strategis. Hampir 50% UMKM di Belgia dan Belanda mengalami keterlambatan dalam penerimaan pembayaran mereka (Kossyva et al., 2014).

Kegagalan penyediaan energi, transportasi, dan infrastruktur komunikasi dapat memiliki risiko besar terhadap kinerja dan daya saing UMKM. Pengangguran struktural yang tinggi menurunkan permintaan barang dan layanan memberikan dampak bagi UMKM secara signifikan (Alegre & Chiva, 2013). Bencana juga dapat mengganggu jaringan rantai pasok dimana banyak UMKM terlibat. Risiko tersebut menurunkan nilai aset, mengganggu operasional, meningkatkan biaya produksi dan mengurangi pendapatan serta potensi pertumbuhan jangka panjang (Linnenluecke & Griffiths, 2010).

Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perekonomian UMKM pada sisi penawaran dan permintaan. Di sisi penawaran, perusahaan mengalami pengurangan tenaga kerja karena tidak sehat, takut tertular, perlu merawat anak-anak saat sekolah ditutup dan akibat larangan keluar rumah. Langkah-langkah mengatasi wabah melalui penguncian dan karantina menyebabkan penurunan utilisasi kapasitas bisnis. Putusnya rantai pasok menyebabkan kekurangan bahan baku dan barang setengah jadi (OECD, 2020).

Di sisi permintaan, hilangnya permintaan dan pendapatan UMKM memengaruhi kemampuan berusaha, kekurangan likuiditas, kehilangan pendapatan, ketakutan akan penularan, kecemasan akan ketidakpastian pada akhirnya mengurangi pengeluaran dan konsumsi. Efek ini diperparah karena pekerja diberhentikan dan perusahaan tidak dapat membayar gaji. Beberapa sektor, seperti pariwisata dan transportasi, berkontribusi pada berkurangnya kepercayaan bisnis dan konsumen. Secara umum, UMKM cenderung lebih rentan terhadap 'social distancing' daripada perusahaan lain (OECD, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dampak risiko Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kota Bandung dan merekomendasikan langkah-langkah kebijakan bagi UMKM

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Kedua metode saling melengkapi agar memberikan hasil analisis lengkap dan integratif. Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk membuat deskripsi secara sistematis mengenai fenomena yang diteliti. Sugiyono (2013), yang menyatakan penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan



dengan variabel yang lain. Untuk mendapatkan data dengan metode deskriptif kuantitatif dilakukan penyebaran kuesioner meliputi 19 pertanyaan.

Metode kualitatif sebagaimana dinyatakan Creswell (2016) merupakan proses investigatif untuk memaknai fenomena sosial dengan tujuan utama untuk memahami situasi, peristiwa, kelompok dan interaksi sosial tertentu. Dalam penelitian ini dilakukan Asesmen Risiko menggunakan pendekatan penilaian risiko kualitatif, *Quantitative Risk Analysis (QRA)*. Penilaian risiko kualitatif merupakan pendekatan penilaian risiko yang paling banyak digunakan karena biaya rendah, mudah dan cepat untuk dilakukan (Modarres, 2006). Dalam QRA, potensial kemungkinan dan konsekuensi dinilai menggunakan skala kualitatif seperti rendah, sedang, dan tinggi. Penilaian risiko kualitatif digunakan untuk menunjukkan kemungkinan tindakan pengendalian risiko dan untuk mencatat tingkat risiko yang melekat, saat ini, dan target (Hopkin, 2018).

Data dan informasi yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dari data kuesioner diperoleh data-data mengenai kondisi UMKM selama masa Pandemi Covid-19. Data sekunder diperoleh dari laporan maupun berita media masa yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut (1) Studi pustaka dan dokumentasi dari berbagai laporan maupun dokumentasi lainnya. Termasuk dalam hal ini berbagai laporan mengenai perkembangan Covid-19 selama masa penelitian (2) Penyebaran kuesioner secara daring kepada para pelaku UMKM

Sampel mencakup 1.463 UMKM di berbagai jenis usaha terdiri dari Fashion (222), Kerajinan (106), Jasa (105) dan Perdagangan (68). UMKM dalam produk makanan (962) memiliki jumlah partisipasi tertinggi dalam penelitian ini. Sekitar 71% responden adalah usaha mikro dengan omzet per tahun < Rp. 300 juta dan sekitar 39% adalah usaha kecil yang menghasilkan penjualan Rp. 300 juta – Rp. 2,5 M. Hanya sekitar 43% UKM yang menggunakan *marketplace* atau media penjualan *online*.

Penyajian hasil penelitian dampak risiko dilakukan dengan analisis QRA. Analisis ini menyajikan dan menganalisis berbagai risiko yang dialami oleh UMKM berdasarkan data lapangan sehingga diketahui karakteristik dampak untuk setiap sektor-sektor. Hal ini karena setiap sektor memiliki dampak yang berbeda-beda. Sedangkan penyajian dan analisis hasil penelitian tentang langkah kebijakan dilakukan dengan menyajikan temuan-temuan evidensi lapangan terkait kondisi dan respons UMKM terhadap wabah Covid-19, analisis berbagai kebijakan yang telah dilakukan di berbagai daerah lain di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, tulisan ini menyajikan rekomendasi kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Bandung

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap UMKM

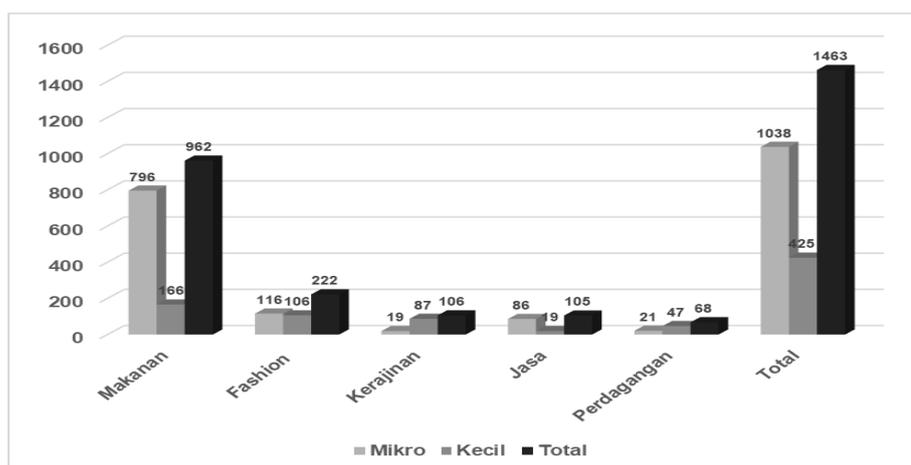
Sebelum membahas dampak risiko PSBB terhadap UMKM di Kota Bandung, terlebih dahulu akan dipaparkan karakteristik dan kondisi umum UMKM di Indonesia dan di Kota Bandung. UMKM di Indonesia memiliki karakteristik informal, usaha yang dicirikan dengan tak berbadan hukum, sistem pencatatan keuangan sederhana, dijalankan dengan modal yang dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan bahwa pada tahun 2018 di Indonesia terdapat 64.194.057 unit usaha UMKM atau sekitar 99 % dari total unit usaha dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja atau sekitar 97 % dari total tenaga kerja di sektor perdagangan dan industri (Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2018). Penyerapan tenaga kerja pada UMKM di Jawa Barat adalah 2 pekerja pada setiap unit usaha (Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2018)



Sementara itu, Kota Bandung merupakan kota perdagangan dan jasa. Dunia usaha di Kota Bandung pada saat ini didominasi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM memiliki potensi sebagai penggerak perekonomian Kota Bandung, karena potensi besar dalam jumlah maupun sumbangan kepada PDRB. Hal ini karena banyaknya aktivitas perdagangan yang di Kota Bandung, baik perdagangan yang dilakukan di pasar tradisional, modern, maupun *online*. Komoditasnya berupa produk asli Bandung, terutama fashion, kerajinan, makanan.

Jumlah UMKM di Kota Bandung 330.314. Produk UMKM umumnya barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. UMKM lebih banyak memanfaatkan sumber daya lokal baik manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Sebagian besar usaha dikelola secara sederhana dan perorangan. Seluruh proses produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri. Distribusi UMKM berdasarkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati urutan teratas dengan 26,39%, Industri Pengolahan 19,0%, Transportasi dan Pergudangan 11,55%, Komunikasi 10,09%, Konstruksi 8,97%, Jasa Keuangan 5,9%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,98%. (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2018).

Selanjutnya untuk menganalisis dampak risiko PSBB terhadap UMKM di Kota Bandung, dilakukan dengan cara menggambarkan analisis kemungkinan dan konsekuensi dalam matriks risiko dan divisualisasikan, dibandingkan, dan diberi peringkat yang berbeda berdasarkan lokasi. Kode warna menunjukkan pentingnya setiap risiko.



**Gambar 3** Profil Responden

Sumber: Raharja & Adiprihadi, (2020, Laporan Penelitian Tidak dipublikasikan)

PSBB merupakan kekarantinaan kesehatan, di Indonesia didefinisikan sebagai; "Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/ atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi". PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan berbasis wilayah, disamping karantina rumah dan rumah sakit. Tujuan PSBB untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit yang sedang terjadi di suatu wilayah tertentu. (UU 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Wilayah).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pembatasan kegiatan yang dilakukan meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum. PSBB dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten / kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan

(Permenkes Tahun 2020). Karantina wilayah kesehatan dinilai cukup efektif menekan angka penularan Covid-19.

Menurut WHO, pelaksanaan PSBB dengan sistematis dan terencana, bisa efektif menangkal kasus baru atau memperlambat penularan. Penerapan PSBB tersebut mengakibatkan kegiatan ekonomi dan sosial menjadi terhambat. Berbagai bidang kehidupan manusia terkena dampak pembatasan tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan secara nasional 2.084.593 pekerja mengalami PHK atau dirumahkan. Sebanyak 1.546.208 orang bekerja di sektor formal dan 538.385 di sektor informal. 85 persen pekerja dirumahkan karena perusahaan tidak beroperasi normal atau ditutup. Mayoritas pekerja tersebut bekerja di UMKM, pariwisata, transportasi, dan manufaktur. Sementara itu, akibat kebijakan lockdown di negara lain, Indonesia kesulitan mengimpor bahan baku dan mengekspor hasil produksi. Secara makro, sebelumnya Menteri Keuangan bahwa pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi domestik dalam APBN 2020 sebesar 5,3 %. Dengan adanya wabah menjadi 2,5% - 0,4% dan inflasi di antara 3,9% - 5,1 %.

### Pemetaan Dampak Risiko PSBB terhadap UMKM

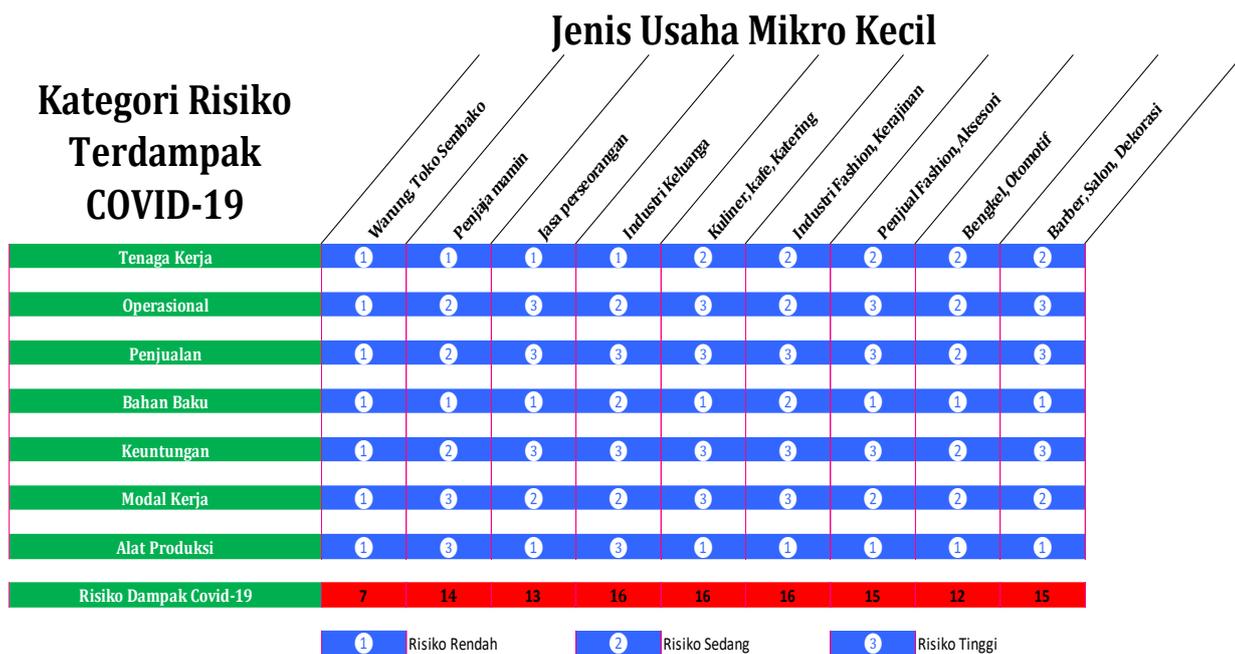
Pemetaan risiko dilakukan untuk mengenali risiko yang dihadapi oleh UMKM. Risiko adalah suatu potensi kejadian yang dievaluasi dari dua aspek yaitu *probability* atau *likelihood* dan *severity* atau *catastrophic*. *Probability*, memandang risiko tersebut dari faktor peluang. *Severity*, memandang risiko dari dampak dan besaran dampak yang harus ditanggung. Dalam pemetaan ini, *probability* tidak diperhitungkan lagi karena sedang berlangsung. Perkiraan dampak kebijakan sebagaimana tabel 2 berikut ini;

Tabel 2 Risiko Potensial Kebijakan PSBB Terhadap UMKM

No	Jenis Kebijakan	Bidang Usaha Terdampak
1	Pengaturan Jaga Jarak Fisik	Salon Kecantikan, Barbershop, Spa, Perawatan Tubuh,
2	Pengaturan Jaga Jarak Sosial	Restoran, Café, Kantin, Warung, Rumah Makan
3	Penutupan Wilayah, Pusat Bisnis dan Perkantoran	Perdagangan, Makanan Minuman, Bengkel, Otomotif
4	Penutupan Kampus Sekolah	Fotocopy, ATK, Warung Jajanan, Kantin Sekolah, Baju Seragam
5	Penutupan Tempat Wisata, Rekreasi dan Travel	Biro Perjalanan, Transportasi, Kerajinan, Makanan, Kaos Suvenir
6	Penutupan Tempat Ibadah	Busana Muslim, Perlengkapan Ibadah
7	Pelarangan Acara Pertemuan dan Perayaan	Event Organizer, WO, Katering, Rias Pengantin, Tata Busana, Sewa alat pesta, Florist
8	Penutupan Mall, Pusat Hiburan	Fashion kasual, aksesoris, kafe, restoran
9	Pelarangan Kegiatan Seni dan Olahraga	Sewa sarana, peralatan, perlengkapan dan baju seni-olahraga

Sumber: Raharja & Adiprihadi, (2020, Laporan Penelitian Tidak dipublikasikan

Asesmen risiko dampak kebijakan dilakukan terdapat pada usaha: (1) Tenaga Kerja, (2) Operasional, (3) Penjualan, (4) Bahan Baku, (5) Tingkat keuntungan, (6) Modal Kerja (7) Aset/Alat Produksi. Perkiraan *severity* risiko terdiri dari: (1) Risiko Rendah, (2) Risiko Sedang, (3) Risiko Tinggi.



Catatan: Assesment per tanggal 20 April. Kondisi sebelum diberlakukan PSBB Bandung Raya

**Gambar 4** Kategori Dampak Risiko

Sumber: Raharja & Adipriyadi, (2020, Laporan Penelitian Tidak dipublikasikan

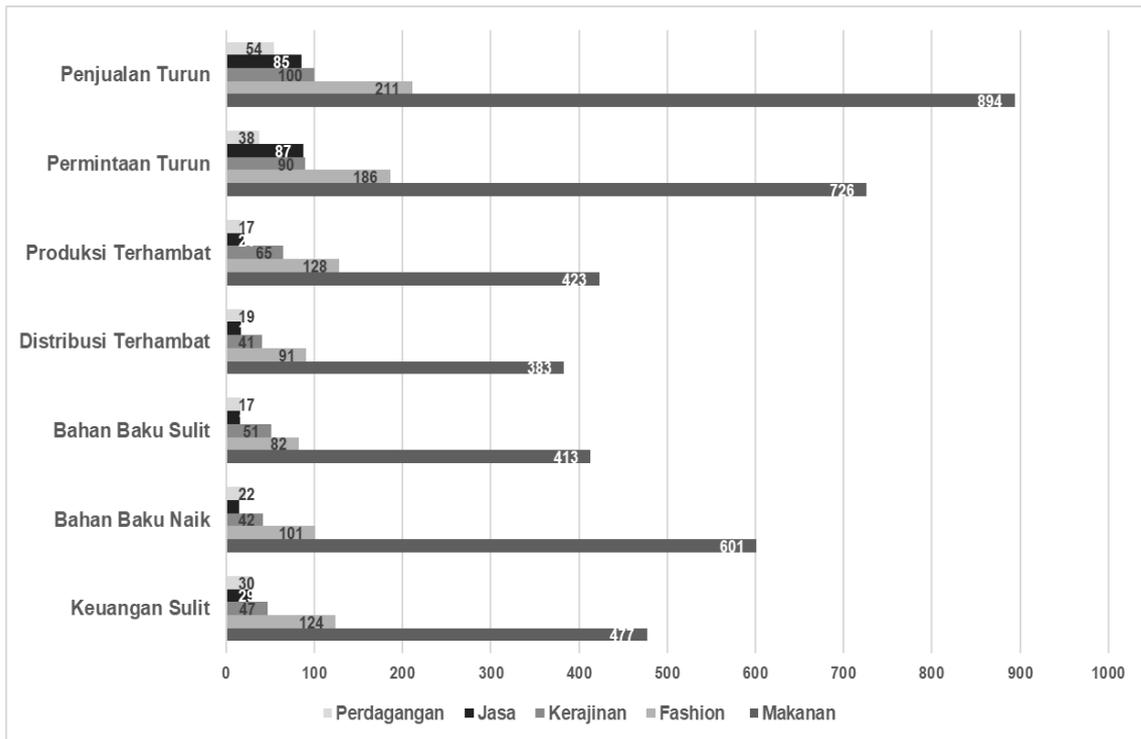
Berdasarkan hasil analisis, hampir seluruh jenis usaha UMKM memiliki tingkat risiko sedang-tinggi, kecuali usaha kebutuhan pokok. Dampak terbesar adalah penurunan penjualan, terkecil distribusi. Pembatasan kegiatan masyarakat, penutupan jalan serta lokasi tertentu berkaitan erat dengan penurunan penjualan pada semua jenis usaha

**Tabel 3** Dampak PSBB yang dirasakan UMKM

Kategori Penutupan	%
Penurunan Penjualan	92%
Penurunan Permintaan	77%
Kenaikan Harga Bahan Baku	53%
Kesulitan Keuangan	48%
Kegiatan Produksi Terhambat	45%
Kesulitan Memperoleh Bahan Baku	40%
Hambatan Distribusi	38%

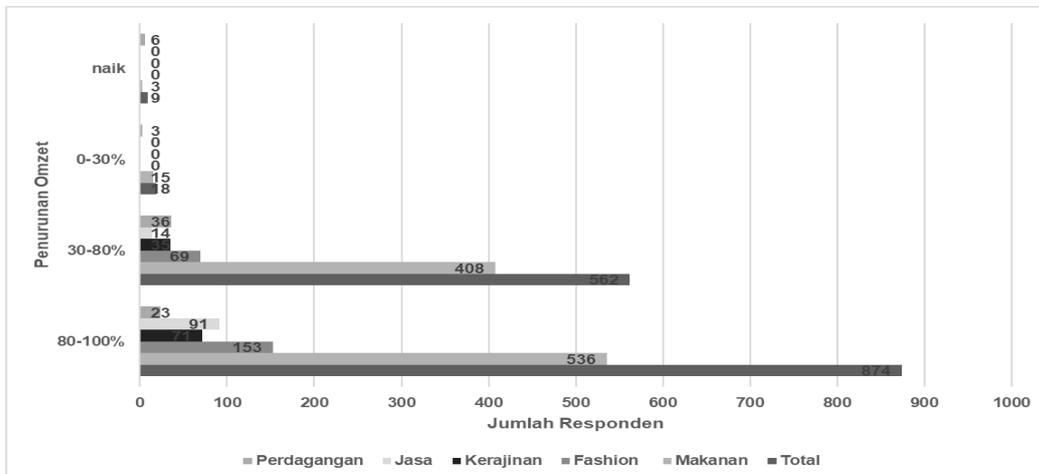
Sumber: Raharja & Adipriyadi, (2020, Laporan Penelitian Tidak dipublikasikan





**Gambar 5** Dampak PSBB Terhadap UMKM

Sumber: Raharja & Adiprihadi, (2020, Laporan Penelitian Tidak dipublikasikan)

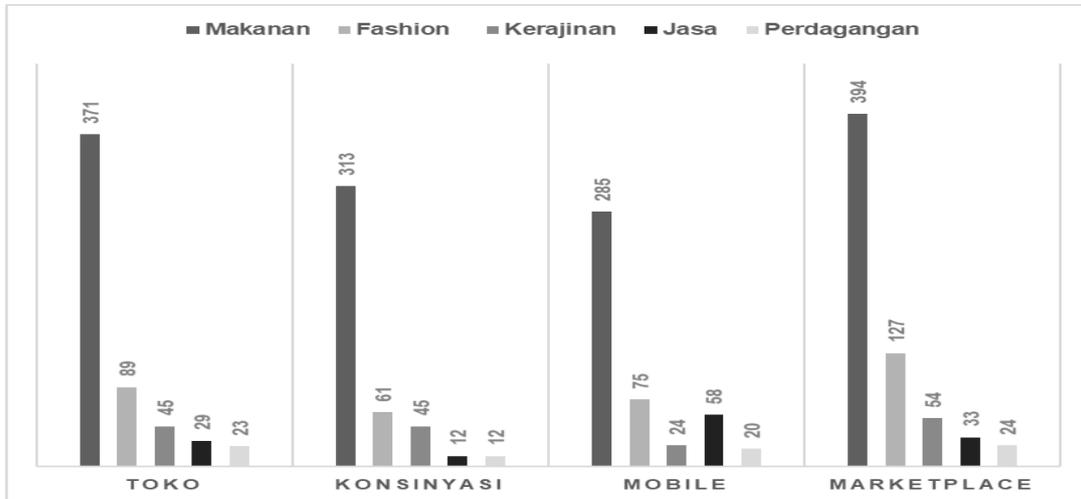


**Gambar 6** Dampak PSBB Terhadap Penjualan UMKM

Sumber: Raharja & Adiprihadi, (2020, Laporan Penelitian Tidak dipublikasikan)

Penurunan penjualan terjadi pada PSBB Tahap 1, karena aturan tinggal di rumah membuat UMKM menghentikan usaha. Sektor yang paling terdampak adalah Jasa yang bersifat *face-to-face business* seperti salon kecantikan, *barbershop* dll. Pelarangan kegiatan pernikahan, pertunjukan dan pengumpulan massa menyebabkan kehilangan usaha/pekerjaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yusida et.al (2020) yang menemukan turunnya pendapatan operasi perusahaan hampir 65% pada usaha hiburan malam karena adanya kebijakan pembatasan atau penutupan

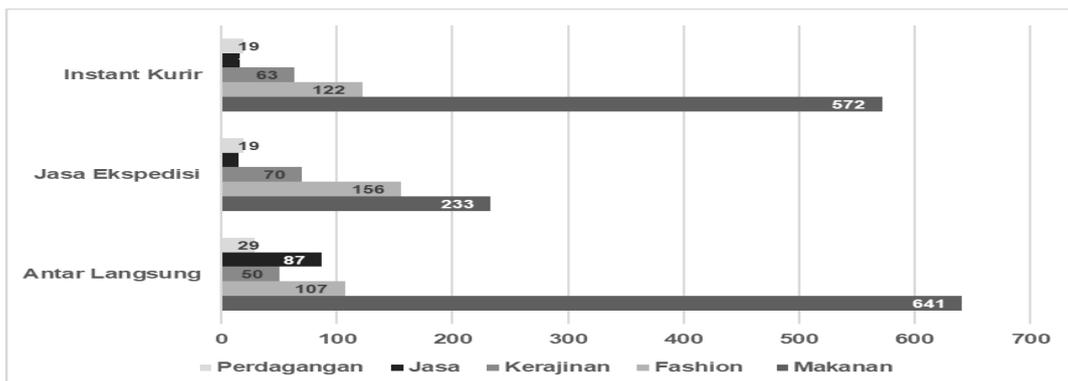
Namun, tidak semua UMKM kehilangan penjualan. Bahkan ada UMKM mengalami peningkatan penjualan, seperti pedagang sembako, herbal, *frozen food*, dan produsen Alat Pelindung Diri (APD).



Gambar 7 Media Penjualan UMKM

Sumber: Raharja & Adiprihadi, (2020, Laporan Penelitian Tidak dipublikasikan)

Meskipun hanya 43% responden yang memanfaatkan e-Commerce, dalam kondisi PSBB menjadi jalan keluar, bahkan semakin meningkat. Hal ini juga didukung tersedianya layanan kurir instan dan jasa ekspedisi yang menjangkau ke hingga pelosok dengan banyak mudah dan harga terjangkau. Berkaitan dengan e-commerce, Nugraheni et.al (2020) menyatakan bahwa pelaku UMKM telah menerapkan strategi yang meliputi perbaikan kualitas produk, kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi dalam menghadapi pandemik Covid-19. Hal yang sama direkomendasikan oleh Hardilawati (2020) bahwa strategi bertahan untuk UKMK berupa melakukan perdagangan secara *e-commerce*, melakukan pemasaran secara digital, melakukan perbaikan kualitas produk dan penambahan layanan. Hal yang sama dikemukakan oleh Alfin (2021), bahwa strategi yang bisa dilakukan pelaku usaha diantaranya melakukan penjualan secara *e-commerce*, melakukan pemasaran secara digital.



Gambar 8 Media Pengiriman

Sumber: Raharja & Adiprihadi, (2020, Laporan Penelitian Tidak dipublikasikan)

### Kebijakan Penanganan Dampak Covid-19 Terhadap UMKM

Berdasarkan uraian pada pembahasan dampak PSBB covid-19 terhadap UMKM dan pembahasan mengenai pemetaan risiko yang dialami oleh UMKM, uraian selanjutnya adalah mengenai kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam penanganan dampak covid-19 terhadap UMKM. Dampak PSBB yang paling tinggi yang dirasakan oleh UMKM adalah penurunan penjualan yang mencapai 92%. Hal ini karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat dan penutupan

**Sam'un Jaja Raharja & Dicky Adiprihadi**, Analisis Kebijakan dalam Penanganan Dampak Risiko Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Bandung Jawa Barat, Indonesia

akses-akses. Bersamaan dengan itu dampak terbesar kedua adalah penurunan permintaan mencapai 77%. Kesulitan keuangan juga dialami oleh UMKM yang mencapai 48%. Hal ini karena pada umumnya modal kerja yang dimiliki oleh UMKM adalah berasal dari keuangan keluarga (kebutuhan rumah tangga) yang tidak terpisah. Pada saat terjadi penurunan penjualan, maka modal kerja yang sebelum dijadikan modal usaha, kemudian dialihkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam jangka Panjang modal kerja ini akan habis, sehingga jika suatu saat situasi normal kembali, UMKM kehilangan sumber permodalan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan dampak covid-19 ini adalah bagaimana memulihkan saluran penjualan dan pasar sasaran penjualan. Dengan kata lain, pasar UMKM dibuka seluas-luasnya dengan kemudahan akses atas pasar tersebut. Kebijakan kedua dalam kaitan dengan keuangan adalah dengan memberikan alternatif sumber permodalan yang mudah dan murah. Dengan kedua kebijakan ini, diharapkan dampak covid-19 dapat diminimalisasikan serta UMKM dapat tetap bertahan, meskipun tidak seoptimal pada saat normal. Pembukaan akses pasar, sasaran penjualan dan bantuan keuangan memungkinkan UMKM dapat bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Hal ini juga dapat menghindarkan UMKM menjual peralatan kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari .

## SIMPULAN

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi cara berinteraksi, bekerja, belajar dan berbisnis di masyarakat. Kendati demikian, karantina wilayah tidak mungkin diberlakukan secara terus menerus dimana jumlah sektor informal dan masyarakat mencari nafkah secara harian. Efek penangguhan aktivitas berdampak langsung pada kehilangan pendapatan. Karantina wilayah secara luas dalam waktu lama akan menimbulkan implikasi sosial. Oleh karena itu mempertahankan sektor usaha paralel dengan pengendalian COVID-19 menjadi pilihan optimal. Pilihan kebijakan partial *lockdown* PSBB cukup efektif mengendalikan laju penularan dengan risiko dampak sosial ekonomi lebih rendah dibandingkan total *lockdown*.

Produk kebijakan publik harus disusun secara sistematis dan realistis melalui tahapan yang transparan, tolok ukur, target sasaran, dan dasar hukum yang jelas. Kebijakan publik tidak tumpang tindih atau saling bertentangan. Kebijakan publik untuk fase AKB difokuskan pada pemulihan sosial ekonomi paralel dengan pengendalian kesehatan. Hal ini sejalan dengan Azizah et.al (2020) bahwa dalam menghadapi pandemik ini perlu langkah cepat, tepat dan nyata dari pemerintah maupun pelaku usaha untuk menanggulangi kerugian yang telah terjadi akibat pandemi serta melakukan pembaharuan dan evaluasi mengenai siklus usaha agar usaha dapat terus bertahan dan berkembang.

Pemerintah harus mengambil kebijakan dalam mengatasi dampak PSBB terhadap UMKM dengan pemulihan akses pasar, salah satunya dengan cara pemerintah menjadikan UMKM dapat menjadi pemasok (supplier) bagi kebutuhan masyarakat maupun pemerintah, baik pengadaan barang maupun yang dapat dipasok oleh UMKM, melalui kampanye "belanja dari UMKM". Untuk mengatasi dampak kesulitan keuangan dibantu dalam bentuk modal kerja berupa pinjaman bunga rendah dan periode pengembalian cukup lama. Kebijakan ini sejalan dengan Sugiri (2020) bahwa bantuan bagi UMKM diantaranya dalam bentuk relaksasi dan restrukturisasi kredit, perluasan pembiayaan modal kerja dan menempatkan kementerian, BUMN dan pemerintah Daerah sebagai penyangga produk

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiraharja, D.G. (2020) Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 13(1), 52-68  
Aditia, D; Nasution, D;, Erlina & Muda, I.(2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita, 5(2), 212-224



- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253-270
- Alfin, A (2021). Analisis Strategi UMKM dalam Menghadapi Krisis di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1 (8), 1543-1552
- Alegre, J., & Chiva, R. (2013). Linking Entrepreneurial Orientation and Firm Performance: The Role of Organizational Learning Capability and Innovation Performance. *Journal of Small Business Management*, 51(4), 491-507.
- Aminy, A. & Fithriasari, K. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Bagi UMKM di Jawa Timur. Paper dipresentasikan pada Seminar Nasional Official Statistics 2020: Statistics in The New Normal: A Challenge of Big Data and Official Statistics. Jakarta: 23-24 september 2020
- Azizah, F.N., Ilham, I.F., Aqidah, L.P., Firdaus, S.A., Astuti, S.A.D, & Buchori, I. (2020). Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian selama Pandemi Covid-19 pada saat New Normal. *OECONOMICUS: Journal of Economics*, 5(1), 46-62
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2018). Potensi Usaha Mikro Kecil Provinsi Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2018). Data Strategis Kota Bandung.
- Creswell, J.W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. (4<sup>th</sup>, ed). (Rianayati Kusmini Pancasari, Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Donthu, N & Gustafsson, A. (2020) Effects of COVID-19 on business and research. *Journal of Business Research* 117 (September), 284-289
- Han, Z & Nigg, J. (2011) The Influences of Business and Decision Makers' Characteristics on Disaster Preparedness—A Study on the 1989 Loma Prieta Earthquake. *International Journal of Disaster Risk Science* 2 (4) (December), 22-31
- Hardilawati, W.N., (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 10(1), 89-98
- Hopkin, P. (2018). *Fundamentals of risk management: understanding, evaluating and implementing effective risk management*. New York: Kogan Page Limited.
- Karyono, Rohadin & Indriyani, D. (2020). Penanganan dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(3), 164-173
- Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro , Kecil , Menengah Dan Usaha Besar 2017-2018. <http://www.dekop.go.id/data-umkm>
- Kossyva, D., Sarri, K., & Georgopoulos, N. (2014). Co-opetition: a Business Strategy for SMEs Times of Economic Crisis. *South-Eastern Europe Journal of Economics*, 12(1), 89-106.
- Linnenluecke, M., & Griffiths, A. (2010). Beyond Adaptation: Resilience for Business in Light of Climate Change and Weather Extremes. *Business & Society*, 49 (3), 477-511.
- Liu, Z., Xu, J., & Han, B. T. (2013). Small- and medium-sized enterprise post-disaster reconstruction management patterns and application. *Natural Hazards*, 68(2), 809-835.
- Modarres, M. (2006). *Risk Analysis in Engineering: Techniques, Tools, and Trends*. Oxford: Taylor & Francis.
- Mufida, S., Timur, F.G. C. & Waluyo, S.D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menangani Wabah Covid-19 dari Perspektif Ekonomi. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1 (2), hal 121-130
- Mujani, S. & Irvani, D. (2020) Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11 (2), 219-238
- Nugraheni, A.P., Pramudyastuti, O.L., Sunaningsih, S.N. (2020). Strategi Pelaku UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 2(1), 45-52
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 23 (01), 13-23
- OECD Secretary General. (2020). *Covid-19: SME Policy Responses. March*, 1-55.
- Pangaribuan, M.T., & Munandar, A.I. (2021). Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 1-9
- Permadhi, P.L.O & Sudirga, I.M. (2020). Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah dan PSBB dalam Penanggulangan Covid-19. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9), 1355-1365
- Pratiwi, I.M. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Pelambatan Ekonomi Sektor UMKM. *Jurnal Neurs* 4(2), 30-39



- Sam'un Jaja Raharja & Dicky Adiprihadi**, Analisis Kebijakan dalam Penanganan Dampak Risiko Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Bandung Jawa Barat, Indonesia
- Pratiwi, K.P, (2021) Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *AMNESTI: Jurnal Hukum*, 3(1), 32-42
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019.
- Raharja, S.J. & Adiprihadi, D. (2020) Pemetaan Risiko Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bandung. Laporan Penelitian Tidak Dipublikasikan. Sumedang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 240-249
- Rosita, R (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(1), 109-120
- Sarip; Syarifudin, A; Muaz, A. (2020) Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(1), 10-20
- Supriyadi (2020). Kebijakan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Hukum Profetik. *Suloh: Jurnal Program Studi Magister Hukum. Edisi Khusus (Oktober)*, 91-109
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiri, D. (2020) Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen*, 19(1), 76-86
- UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Wilayah.
- Thaha, A.F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand* 2(1), 147-153
- Wulandari, S.N. (2020). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Bening* 7(2), 165-177
- Yusida, E., Qurrata, V. A., Purnamasari, V., Seprillina, L., Melinda, S and Huang, Wen-Chi (2021). Determining the Challenges and Opportunities of Covid-19 to the Underground Economy. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10 (s1), 218-228

